Bali Post

Anggota DPD Asal Bali Mestinya Malu

SIKAP tegas Ketua Komite III DPD-RI Hardi Slamet Hood menolak reklamasi Teluk Benoa dan akan berjuang agar Perpres 51/2014 dicabut, semestinya menjadi kritik para wakil rakyat yang masih abu-abu membela lingkungan Bali. "Saya juga heran dengan sikap oknum senator Bali yang kurang perhatian terhadap nasib Bali. Mereka mesti malu dengan rakyat Bali. Senator seperti ini perlu dipertanyakan komitmennya menjaga tanah kelahirannya," tegas akademisi bidang politik Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.H., M.AP., Kamis (14/5) kemarin.

Pernyataan ini menyusul kegamangan sikap anggota DPD wakil Bali. Seperti yang pernah dinyatakan Made "Lolak" Arimbawa, bahwa dia bukan dalam posisi pro atau kontra terkait dengan reklamasi. Pernyataan itu disampaikannya dalam konsultasi publik amdal kegiatan revitalisasi Teluk Benoa di Gedung Wiswasabha.

Sementara itu, anggota DPD Cok Ratmadi dalam catatan *Bali Post*, belum pernah menyuarakan tentang pro-kontra reklamasi di Bali. Namun ketika menjadi Ketua DPRD Bali, Ratmadi berulangkali menyampaikan agar rencana itu dikaji kembali.

Sementara itu dua anggota lainnya, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, S.E.(MTRU), M.Si. dan Gede Pasek Suardika, telah menyampaikan sikap tegasnya. Di beberapa pertemuan, Arya Wedakarna secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Pada pertemuannya dengan utusan KMHDI, Rabu lalu, ia pun mengaku akan mengusahakan pencabutan Perpres No.51 Tahun 2014 yang selama ini memuluskan rencana reklamasi.

Hal. 23
Sinyalnya Menolak

Sinyalnya Menolak

Dari Hal. 1

"Saya akan mengusahakan, kemarin Ketua Komite III sudah menolak. Komisi IV DPR sudah menolak. DPD-RI, sebagian anggota menolak. Saya bicara dengan Menteri Agraria dan Kepala BPN, ditolak oleh beliau, *astungkara*. Saya ngomong sama Menteri Perikanan, Ibu Susi, sinyalnya menolak walaupun ada opsi tukar guling atau pengganti, tetapi intinya menolak. Saya tanya Pak Puspayoga, beliau menolak," ujarnya.

Sikap serupa juga dinyatakan Gede Pasek Suardika pada rapat dengar pendapat DPD-RI, bulan lalu. Dalam rapat tersebut, Pasek Suardika mementahkan semua penjelasan yang disampaikan investor yang menyertakan tim kajiannya dari sejumlah akademisi. Ia juga mengkritik penjelasan dari pihak KLH dan KKP. "Kalau pendekatannya Tri Hita Karana, masih jauh sekali. Orang Bali enggak perlu Benoa direklamasi. Dulu Pulau Serangan juga dijanjikan seperti itu, tetapi nyatanya saat ini pantai dari Gianyar sampai Karangasem rusak. Lalu yang bertanggung jawab mengeluarkan izin itu sekarang ke mana? Kami sudah tidak tahu ke mana. Jangan (investor) diperlakukan sebagai dewa untuk memperbaiki Bali," kata Pasek Suardika.

Pasek Suardika mengatakan reklamasi tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan teori modern, tetapi pemerintah dan investor mesti memahami cara pandang orang Bali dalam memelihara lingkungannya. **(kmb32/rah)**

Edisi : Jumat, 15 Mei 2015

Hal : 1 dan 23

Bali Post

KMHDI Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Bali Post/rin

PERNYATAAN SIKAP - *Sekretaris KMHDI Bali A.A. Ngurah Lokanata (kiri) membacakan pernyataan sikap didengarkan oleh anggota DPD-RI Arya Wedakarna (tengah) dan akademisi Unud I Putu Anom (paling kanan).*

Edisi : Jumat, 15 Mei 2015

Hal : 1 dan 23

Bali Post

Denpasar (Bali Post) -

Sejumlah perwakilan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali, KMHDI Denpasar dan KMHDI Badung mendatangi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali, Rabu (13/5). Mereka menyatakan sikap menolak atau tidak mendukung izin dan hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa untuk direvitalisasi dengan cara mereklamasi.

Sejumlah alasan penolakan tertuang dalam penyataan sikap yang dibaca Sekretaris KMHDI Bali A.A. Ngurah Lokanata. Rencana reklamasi dinilai tidak mendesak bagi pembangunan Bali Selatan, bahkan Bali secara umum. Rencana ini juga disebut akan memperparah ketimpangan antara Bali Selatan dengan wilayah Bali lainnya.

"Kami menilai wacana untuk menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 200 ribu tenaga kerja tidak sesuai dengan kondisi angka pengangguran di Bali pada bulan Februari 2015 yang jumlahnya hanya mencapai 33.611 orang," imbuh Lokanata.

Hal. 23

Lapangan Kerja

" Kami menilai wacana untuk menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 200 ribu tenaga kerja tidak sesuai dengan kondisi angka pengangguran di Bali pada bulan Februari 2015 yang jumlahnya hanya mencapai 33.611 orang."

Sekretaris KMHDI Bali
A.A. Ngurah Lokanata

Lapangan Kerja

Dari Hal. 1

Pihaknya menyarankan agar masalah pengangguran diatasi dengan mengoptimalkan lapangan kerja yang ada di destinasi pariwisata luar daerah Bali Selatan. Termasuk mengoptimalkan program Pemprov Bali seperti Simantri, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, serta menggiatkan *job fair*. Terkait pariwisata, KMHDI meminta pemerintah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat segera mengevaluasi dampak-dampak negatif yang membuat wisatawan jenuh datang ke Bali.

"Bukan malahan harus melakukan pengembangan destinasi pariwisata baru yang berlokasi di Teluk Benoa. Rencana ini kami pandang telah membuat harmonisasi masyarakat di wilayah Bali Selatan menjadi terpecah belah. Kalau ini dibiarkan, kami nilai akan mengancam stabilitas harmonisasi *krama* Bali Selatan," jelas Lokanata.

Pihaknya pun meminta pemerintah pusat, DPR-RI, DPD-RI, Pemprov Bali, DPRD Bali, pemerintah dan DPRD di kabupaten/kota untuk menyikapi dan memutuskan bahwa izin dan hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa tidak perlu dilaksanakan. Pemerintah dan DPRD dikatakan lebih baik menangani kawasan pesisir pantai di Bali yang mengalami abrasi.

Kedatangan KMHDI hanya diterima anggota DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, S.E.(MTRU), M.Si. Di hadapan para aktivis, Arya Wedakarna secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Selain Arya Wedakarna, tokoh-tokoh seperti akademisi Unud I Putu Anom, Ketua Love Bali Forum I Made Mandera, serta anggota Love Bali Forum I Wayan Jondra juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ketiganya juga menyatakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. **(kmb32)**

Edisi : Jumat, 15 Mei 2015

Hal : 1 dan 23